

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam koordinasi pengembangan UMKM di Kabupaten Brebes belum optimal. Permasalahan yang terjadi dalam koordinasi pengembangan UMKM di kabupaten Brebes yaitukurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam bentuk pengembangan UMKM itu sendiri, dalam arti setiap kinerja anggota harus ada pengarahan dan kekuatan yang diberikan oleh kepala bidang sehingga anggotanya mengerti sesuai dengan tujuan dalam isi aturan-aturan yang telah dibuat, maka perlu adanya kesadaran dari setiap pemimpin maupun anggota staf instansi yang berinisiatif untuk melakukan kerjasama dan saling membagi pengetahuan agar dapat bekerjasama dan aktif dalam melakukan koordinasi. Sifat pemimpin tidak melakukan pengontrolan secara aktif sehingga kinerja setiap anggota atau tiap bidang dalam pelaksanaan dalam koordinasi pengembangan UMKM di kabupaten Brebes itu tidak maksimal, begitu juga ketepatan waktu dari anggota dalam melaksanakan program sendiri ada yang belum efektif dan efisien.

Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait bersama UMKM dan Bank Jateng dalam pengembangan UMKM di kabupaten Brebes sehingga data dan informasi yang mereka dapatkan tidak sesuai dan berbeda-beda. Permasalahan yang lain yaitu kurangnya sumber daya manusia (pegawai ASN) yang bekerja untuk menjalankan tugas sesuai amanat aturan-aturan atau peraturan daerah kabupaten Brebes. Jadi sesuai dengan rumusan masalah mengenai bagaimana koordinasi pengembangan UMKM tersebut masih belum

berjalan baik, terkait faktor penunjang atau pendukung dan penghambat sangat berpengaruh terhadap keadaan perkembangan UMKM, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk koordinasi pengembangan UMKM diberlakukan semaksimal mungkin dari masing-masing instansi terkait UMKM.

1. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Koordinasi Pengembangan UMKM di Kabupaten Brebes.

a. Faktor pendukung

1. Fasilitas dan transportasi yang dimiliki oleh dinas-dinas terkait dalam melakukan koordinasi.
2. Kecukupan anggaran dari dinas-dinas terkait, dalam pengembangan UMKM di kabupaten Brebes.
3. Penyediaan peminjaman modal untuk UMKM, dalam pelaksanaan pengelolaan UMKM.
4. Adanya kerjasama yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Faktor Penghambat.

1. Kurangnya staf tenaga kerja atau pegawai dinas dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan UMKM.
2. Kurangnya pemahaman anggota atau staf dinas dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan UMKM.
3. Faktor lingkungan antar kantor dinas dan tempat UMKM sangat berjauhan.

4. Kurangnya pemahaman staf anggota UMKM dalam penggunaan digitalisasi.
5. Kurangnya relasi untuk membuka pemasaran hasil produksi dari UMKM ke luar kota ataupun luar negeri.
6. Adanya permasalahan Covid 19 sehingga menjadi faktor kendala yaitu tidak diperkenankannya tatap muka sehingga pelaku UMKM diwajibkan melakukan pendaftaran sistem online, masyarakat sulit mendaftarkan usaha karena tidak semua paham dengan pendaftaran secara internet.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan bersama dinas terkait dalam koordinasi pengembangan UMKM

Mengoptimalkan sumberdaya manusia, dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan bersama dinas-dinas terkait, agar dapat memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan UMKM di kabupaten Brebes, pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam meningkatkan pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMKM sehingga dapat mengelola hasil produksi yang berkualitas dan inovasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

5.2.1. Saran Akademis

Saran akademisi merupakan sebuah saran yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan teori tentang koordinasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, dalam implementasi, fungsi koordinasi ilmu pemerintahan dan analisa koordinasi ilmu pemerintahan, maka peneliti memberikan saran akademisi sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan koordinasi pengembangan UMKM dengan dinas-dinas terkait, apabila menemukan permasalahan fundamental dalam hubungannya dengan upaya memajukan atau mengembangkan UMKM maka seharusnya dibentuk sebuah asosiasi sebagai wujud sosialisasi bidang industri kepada khalayak umum atau masyarakat luas, hasil bermanfaat bagi pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan.
- b. Lebih dikembangkan pengetahuan atau wawasan mengenai ruang lingkup industri dalam sekup regional maupun global, sebagai wujud dari pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.

5.2.2. Saran Praktis

Saran praktis ini tertuju kepada pemerintah kabupaten Brebes khususnya pada dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan, sesuai dengan permasalahan yang didapatkan oleh peneliti sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam skripsi, saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Saran untuk dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan, Padasaat penetapan tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi dalam pengembangan UMKM pada dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan bersama dinas-dinas terkait harus lebih memahami terlebih dahulu tentang tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengembangan UMKM dikabupaten Brebes, dan untuk sebagai kepala dinas harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan kepala bidang dan kemampuan staf anggota dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan UMKM sesuai dengan tugas yang di amanatkan dalam aturan-aturan/Surat edaran Bupati Kabupaten Brebes sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang kementerian koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Koordinasi antara dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan bersama dinas-dinas terkait serta Bank Jawa Tengah, lebih aktif lagi dalam melakukan koordinasi. Keterbukaan antara dinas-dinas terkait dan Bank Jawa Tengah harus selalu ada agar informasi serta data yang didapatkan sinkron sesuai dengan permasalahan yang didapatkan dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan UMKM di kabupaten Brebes. Serta ketegasan dari seorang pemimpin harus mengambil sikap apabila kinerja staf/atau pegawai dinas tidak mencapai target dengan waktu yang ditentukan.
- c. Pegawai dinas koperasi usaha mikro kecil dan perdagangan serta dinas-dinas terkait dan Bank Jawa Tengah harus mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan koordinasi pengembangan

UMKM dikabupaten Brebes, karena kemampuan anggota UMKM sendiri belum paham dalam melakukan pemasaran lewat aplikasi Online, serta bentuk pemberdayaan dalam pengelolaan SDM UMKM sendiri masih belum mengerti dalam proses pengelolaan UMKM itu sendiri sehingga hasil produksi yang dihasilkan kurang berkualitas dan inovasi, dan faktor lainnya seperti kurangnya pegawai ASN dari dinas-dinas terkait sehingga program yang dijalankan masih tumpang tindih, sehingga belum optimal dalam membuka relasi pemasaran hasil produksi dari UMKM, faktor keterjangkauan lingkungan yang harus ditempuh oleh UMKM ke dinas-dinas terkait sangat berjauhan.

- d. Pemerintah daerah kabupaten Brebes seharusnya lebih berpartisipasi dalam pengembangan UMKM sebagai upaya memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar dan juga sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dari fungsional pemerintahan itu sendiri.